

## BAB II UNI EROPA

### 2.1. Sejarah Integrasi Eropa

Gagasan untuk menyatukan negara-negara Eropa telah dimulai sejak akhir abad ke-18 ketika Napoleon berupaya menyatukan Eropa di bawah Kekaisaran Perancis. Sejarah berulang kembali ketika Adolf Hitler mencoba menundukkan Eropa di bawah *The Third Reich*. Usaha menyatukan Eropa secara damai dimulai pada tahun 1923 oleh pemimpin *Pan-European Movement* dari Austria melalui gagasan "*United States of Europe*". Pada tahun 1929, Menteri Luar Negeri Perancis, Aristide Briand mengusulkan dibentuknya "*European Union*" dalam kerangka Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*). Usaha-usaha tersebut gagal terutama disebabkan oleh kuatnya rasa nasionalitas dan kekuatan imperialisme waktu itu.<sup>51</sup>

Pemikiran untuk membentuk Eropa bersatu diperkenalkan kembali oleh Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, dalam pidatonya di Basel, Swiss, tahun 1946. Churchill mengharapkan bahwa masyarakat Eropa dapat hidup secara damai dalam rasa aman dan kebebasan melalui suatu "Eropa Serikat".<sup>52</sup>

Rencana rekonstruksi negara-negara di kawasan Eropa Barat pasca Perang Dunia II mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Pada tahun 1949, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat membentuk aliansi keamanan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Sejak saat itu Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi, Marshall Plan, ke kawasan Eropa Barat. Negara-negara penerima *Marshall Plan* tergabung dalam *Organization for European Economic Development* (OEED). Tujuan utama Amerika Serikat pada saat itu adalah berupaya menciptakan suatu aliansi di kawasan Eropa Barat untuk menghadapi kekuatan komunis serta mencegah konflik di kawasan ini.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> <http://www.cia.gov/factbook/html>

<sup>52</sup> Edison Muclis. *Integrasi Menuju Uni Eropa*, CSIS. Jakarta. 1997. Hlm 551

<sup>53</sup> Richard Mansbach, *Global Puzell : Issues and Actor in World Politic*. Second Edition. New York. 1997: Hlm 469

Selanjutnya, perkembangan integrasi Eropa melalui pembentukan institusi internasional dapat dilihat dalam beberapa tahapan. Dengan tujuan agar negara yang ingin bergabung dengan keanggotaan Uni Eropa mematuhi segala isi dari perjanjian ini, karena setiap periodenya berbeda mengenai persyaratan keanggotaan Uni Eropa. Tahapan dari perjanjian tersebut adalah:

### 1. Perjanjian Paris (ECSC), 1952

Proses integrasi Eropa bermula dari dibentuknya Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa (European Coal and Steel Community/ ECSC)<sup>54</sup>, yang Traktat-nya ditandatangani tanggal 18 April 1951 di Paris dan berlaku sejak 25 Juli 1952. Traktat ini ditandatangani oleh Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg dan Perancis. Tujuan utama *ECSC Treaty* adalah penghapusan berbagai hambatan perdagangan dan menciptakan pasar bersama dimana produk, pekerja dan modal dari sektor batu bara dan baja dari negara-negara anggotanya dapat bergerak dengan bebas. Hasil utama dari *The Treaty of Paris* adalah: (a) Pembentukan *European Coal and Steel Community* (ECSQ); (b) penghapusan rivalitas lama antara Jerman serta Perancis, dan (c) memberi dasar bagi pembentukan Federasi Eropa.<sup>55</sup>

### 2. Perjanjian Roma (Euratom dan EEC), 1957

Pada tanggal 1-2 Juni 1955, para menteri luar- negeri keenam negara penandatangan ECSC Treaty bersidang di Messina, Itali, dan memutuskan untuk memperluas integrasi Eropa ke semua bidang ekonomi. Pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma ditandatangani *European Atomic Energy Community (EAEC)*,

---

<sup>54</sup> Cikal bakal pembentukan Uni Eropa diawali oleh usulan Jean Monnet, seorang negosiator Perancis, kepada Menteri Luar Negeri Perancis Robert Schuman dan Kanselir Jerman Konrad Alexander. Monnet mengusulkan bahwa suatu masyarakat yang berkepentingan bersama dapat dibentuk untuk mengatur pasar batu bara dan besi baja dibawah badan pengawas yang independen. Pada tanggal 18 April 1951 melalui *The Treaty of Paris, the Schuman Plan*-diterima oleh Perancis, Jerman Itali, Belanda, Belgia dan Luksemburg. Masyarakat besi dan baja Eropa (European Coal and Steel Community ECSC) yang resmi berdiri pada tanggal 10 Agustus 1952 (<http://europea.eu.int/>).

<sup>55</sup> ibid

namun lebih dikenal dengan *Euratom* dan *European Economic Community (EEC)*. Kedua Traktat tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1958.<sup>56</sup>

Tujuan utama EEC Treaty adalah penciptaan suatu pasar bersama diantara negara-negara anggotanya melalui :

- Pencapaian Custom Unions serta membangun pasar bersama melalui penghapusan berbagai tarif bea, kuota impor dan berbagai hambatan perdagangan lain antara negara anggota, serta membedakan suatu *Common Customs Tariff (CCT)* dengan negara non anggota;
- Implementasi serta harmonisasi kebijakan-kebijakan nasional anggota, *for freedom of movement* barang, jasa, pekerja dan modal.

### 3. Perjanjian Brussel, 1965

Pada tanggal 8 April 1965, *European Coal and Steel Community (ECSC)*, *European Economic Community (EEC)* dan *European Atomic Energy Community (Euratom)* digabung menjadi Masyarakat Eropa/ME (*European Community/EC*), berdasarkan Perjanjian Brussel.<sup>57</sup> Tiga pilar kerjasama Uni Eropa yakni Pasar Tunggal Eropa, Kebijakan Luar Negeri & Hasil Utama dari Perjanjian Brussel ini adalah:

- a. Sejak tanggal 1 Juli 1965, ketiga komunitas tersebut digabung menjadi Masyarakat Eropa (ME) serta dibentuk satu Dewan dan satu Komisi untuk memudahkan manajemen kebijakan bersama yang semakin luas;
- b. Pembentukan Dewan Menteri Uni Eropa, menggantikan *Special Council of Ministers* di ketiga *Communities*, dan melembagakan “*Rotating Council Presidency*” untuk masa jabatan selama 6 bulan;
- c. Membentuk Badan Audit Masyarakat Eropa, menggantikan Badan-badan Audit ECS, Euratom dan EEC.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Ibid

<sup>57</sup> Ibid

<sup>58</sup> Ibid

#### 4. Perjanjian Schengen, 1985

Pada tanggal 14 Juni 1985, Belanda, Belgia, Jerman, Luksemburg dan Perancis menandatangani Perjanjian Schengen. Dalam Perjanjian Schengen ini, para negara anggota tersebut sepakat untuk secara bertahap menjamin pergerakan bebas manusia, baik warga mereka maupun warga negara lain. Perjanjian ini kemudian diperluas dengan Memasukkan Itali (1990), Portugal dan Spanyol (1991), Yunani (1992), Austria (1995), Denmark, Finlandia, Norwegia dan Swedia (1996).<sup>59</sup>

#### 5. Single Act, Brussels, 1987

Berdasarkan *White Paper* yang disusun oleh Komisi Eropa dibawah kepemimpinan Jacques Delors pada tahun 1984, Masyarakat Eropa mencanangkan pembentukan sebuah Pasar Tunggal Eropa. *Single European Act* yang ditandatangani pada bulan Februari 1986, dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 1987. Tujuan utama *Single Act* adalah pencapaian pasar internal yang ditargetkan untuk dicapai sebelum 31 Desember 1992.<sup>60</sup>

Hasil utama single Act adalah :

- a. Melembagakan pertemuan reguler antara Kepala Negara dan/atau Pemerintahan negara anggota Masyarakat Eropa, minimal setahun dua kali, dengan dihadiri oleh Presiden Komisi Eropa;
- b. Kerjasama Politik Eropa secara resmi diterima sebagai forum koordinasi dan konsultasi antar pemerintah;
- c. Seluruh persetujuan asosiasi dan kerjasama serta perluasan Masyarakat Eropa harus mendapat persetujuan Parlemen Eropa.<sup>61</sup>

#### 6. Perjanjian Maastricht, Treaty on European Union, 1992

*Treaty on European Union*<sup>62</sup> (TEU) ditandatangani di Maastricht pada tanggal 7 Februari 1992 dan mulai berlaku tanggal 1 November 1993, mengubah Masyarakat Eropa menjadi Uni Eropa .<sup>63</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Ibid

Hasil utama dari *Treaty on European Union* adalah:

- a. Keamanan Bersama, serta Kerjasama di Bidang Peradilan dan Masalah Dalam Negeri;
- b. Memberi wewenang yang lebih besar kepada Parlemen Eropa untuk ikut memutuskan ketentuan hukum Uni Eropa melalui mekanisme *co-decision procedure*, dimana Parlemen dan Dewan Uni Eropa bersama-sama memutuskan suatu produk hukum. Bidang-bidang yang masuk dalam prosedur tersebut adalah: pergerakan bebas pekerja, pasar tunggal, pendidikan, penelitian, lingkungan, Trans-European Network, kesehatan, budaya dan perlindungan konsumen;
- c. Memperpanjang masa jabatan Komisioner menjadi 5 tahun (sebelumnya 2 tahun) dan pengangkatannya harus mendapat persetujuan Parlemen;
- d. Memperkenalkan prinsip *subsidiarity*, yaitu membatasi wewenang institusi Uni Eropa agar hanya menangani masalah-masalah yang memang lebih tepat dibahas di tingkat Uni Eropa Berdasarkan Perjanjian Maastricht, tujuan Uni Eropa yaitu:
  - Untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial (melalui pembentukan pasar tunggal tahun 1993 dan peluncuran mata uang tunggal tahun 1999);
  - Untuk menunjukkan identitas Uni Eropa dalam lingkungan internasional (melalui bantuan kemanusiaan kepada negara-negara non Uni Eropa, tindakan dalam krisis internasional, kesamaan posisi dalam organisasi internasional, kebijakan luar negeri dan keamanan bersama);
  - Untuk membangun suatu wilayah kebebasan, keamanan dan keadilan;
  - Untuk mempertahankan dan mengembangkan peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh Uni Eropa (termasuk lembaga-lembaga sebelumnya).<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Traktat Maastrich terdiri dari 7 bagian judul yang dilengkapi dengan 14 protokol dan 33 deklarasi. Ketujuh bagian judul tersebut adalah : Bagian I tentang Ketentuan Umum; Bagian II tentang Amandemen dan Perjanjian MEE; Bagian III tentang Amandemen Perjanjian ECSC; Bagian IV tentang Perjanjian Euroatom; Bagian V tentang Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama; Bagian VI tentang Ketentuan Kerjasama dalam Masalah Keadilan dan Urusan Dalam Negeri; dan Bagian VII tentang Ketentuan Penutup (<http://www.europa.eu.int>).

<sup>63</sup> Ibid

<sup>64</sup> European treaty ([www.europ.eu.int](http://www.europ.eu.int)) (diakses 12 Oktober 2008)

## 7. The Treaty of Amsterdam, 1997

Pada tanggal 17 Juni 1997 di Amsterdam, Dewan Eropa merevisi TEU dan menghasilkan *The Treaty of Amsterdam* yang mempunyai empat tujuan utama:

- a. Memprioritaskan hak-hak dan penyediaan lapangan kerja bagi warga negara Uni Eropa. Traktat Amsterdam menekankan perlunya usaha bersama seluruh negara anggota untuk mengatasi pengangguran, yang dianggap sebagai masalah utama Eropa saat ini;
- b. Menghapuskan hambatan terakhir menuju *freedom of movement* dan memperkuat keamanan, dengan meningkatkan kerjasama negara anggota di bidang *Justice and Home Affairs*;
- c. Memberi Uni Eropa suara yang lebih kuat di dunia internasional dengan menunjuk seorang *High Representative for the CFSP* dan membuat struktur institusi Uni Eropa lebih efisien

Hasil utama dari The Treaty of Amsterdam adalah :

- a. Memberi wewenang kepada Dewan Menteri untuk memberikan hukuman pada negara anggota (dengan mencabut sementara beberapa hak mereka) jika negara anggota tersebut melakukan pelanggaran HAM;
- b. Mengadakan kerjasama dari beberapa negara anggota (minimal 8 negara) meskipun tidak semua negara anggota menyetujuinya. Negara yang tidak (atau belum) menyetujui kerjasama tersebut dapat bergabung di kemudian hari;
- c. Menjadikan visa dan imigrasi sebagai kebijakan bersama (kecuali bagi Inggris dan Irlandia).

## 8. The Treaty of Nice, 2000

Dewan Eropa mengadakan pertemuan pada tanggal 7-9 Desember 2000 di Nice mengadopsi sebuah Traktat baru yang berlaku pada tanggal 1 Februari 2003.

Hasil utama dari *The Treaty of Nice* adalah :

- a. Dengan mempertimbangkan perluasan anggota Uni Eropa, maka jumlah anggota Parlemen dibatasi maksimal sebanyak 732 orang serta memberikan

- alokasi jumlah kursi tiap negara anggota (sudah termasuk negara anggota baru);
- b. Mengganti mekanisme pengambilan keputusan bagi 30 pasal dalam TEU yang sebelumnya menggunakan *unanimity*, dan diganti dengan menggunakan mekanisme suara mayoritas;
  - c. Merubah bobot suara negara-negara anggota Uni Eropa mulai 1 Januari 2005 (sudah termasuk negara-negara anggota baru);
  - d. Mulai 2005, membatasi jumlah Komisioner, 1 Komisioner tiap 1 Negara, dan batas maksimum jumlah Komisioner akan ditetapkan setelah Uni Eropa beranggotakan 27 negara, serta memperkuat posisi Presiden Komisi

### **9. Komite Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Committee*)**

Komite Ekonomi dan Sosial mewakili berbagai kategori yang relevan dari aktivitas sosial dan ekonomi. Masa jabatan para anggota Komite ini adalah empat tahun. Keanggotaan Komite ditunjuk oleh Dewan berdasarkan calon yang diajukan oleh setiap negara anggota. Keanggotaan Komite tersebut terdiri atas 24 orang dari Jerman, Inggris, Perancis dan Italia; 21 anggota dari Spanyol, 12 orang dari Belgia, Yunani, Belanda, Portugal, Austria, dan Swedia, 9 orang dari Denmark, Finlandia, dan Irlandia dan 6 orang dari Luksemburg.

### **10. Komite-Komite Regional (*The Committee of Regions*)**

Komite-Komite Regional ini merupakan badan penasihat independen yang bertanggung jawab kepada para wakil dan pejabat lokal yang berwenang di Uni Eropa. Komite ini memastikan bahwa identitas dan prerogatif regional dan local dihormati. Komite ini membantu menangani masalah-masalah mengenai kebijakan regional, lingkungan, dan pendidikan. Komite ini terdiri atas perwakilan dari otoritas regional dan lokal.

### 2.1.3. Perluasan Keanggotaan Uni Eropa

Berbagai Traktat Uni Eropa di atas kemudian beberapa kali diamandemen, terutama berkaitan dengan penambahan anggota yaitu: Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luksemburg dan Belanda (6 anggota awal-1957); Denmark, Irlandia dan Inggris (1973); Yunani (1981); Portugal dan Spanyol (1986); Austria, Finlandia dan Swedia (1995). Pada 1 Mei 2004, Uni Eropa memperluas keanggotaannya dengan 10 negara Eropa Tengah, yaitu Estonia, Latvia, Lituania, yang berbatasan dengan Rusia di utara, Polandia, Hongaria, Slowakia, dan Ceko, Slovenia, Malta, serta Siprus, dengan dua kelompok yang masih bermusuhan secara politik, Yunani dan Turki (untuk sementara hanya bagian Yunani pulau ini saja).

Perluasan keanggotaan akan memperkokoh posisi Uni Eropa di dunia serta akan mempengaruhi seluruh badan kebijakan internal Uni Eropa. Dengan masuknya negara anggota baru juga akan mengakibatkan perluasan wilayah sampai 34%, sehingga dapat meningkatkan pengaruh Uni Eropa secara internasional, khususnya dalam menerapkan demokrasi yang stabil diseluruh kawasan Eropa.

Melalui perluasan keanggotaan ini, Uni Eropa akan memiliki lebih dari 100 juta jiwa negara baru yang akan memberikan dorongan baru terhadap pertumbuhan dan integrasi ekonomi secara keseluruhan. Bagi para negara anggota Uni Eropa, perluasan akan meningkatkan aktivitas perdagangan dengan negara-negara kandidat, sehingga akan meningkatkan sistem jaminan sosial warga Uni Eropa.

Keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi setiap negara Eropa yang ingin menjadi anggota dengan tiga persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, negara yang bersangkutan harus ada di benua Eropa. Kedua, negara tersebut harus menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakkan hukum, penghormatan terhadap Hak azasi manusia. Ketiga, menjalankan segala peraturan perundangan Uni Eropa (*aquis communitaires*).

Tidak satu pun dari negara-negara yang sebelumnya dikuasai Uni Soviet ini mau dikategorikan sebagai Eropa Timur; Eropa Timur itu terletak di sebelah timur mereka semua. Dengan penambahan negara anggota ini, Uni Eropa terdiri dari 25 negara (UE25) dengan jumlah penduduk sebesar 450 juta orang. Negara-

negara Eropa Tengah akan membawa sekitar 170 juta orang, lebih kurang 45 persen dari jumlah penduduk Uni Eropa sekarang.<sup>65</sup>

Dewan Eropa, dewan kepala negara dan pemerintah, baru akan menentukan pada bulan Desember 2004 bilamana mereka akan memulai pembicaraan tentang keanggotaan Turki, sedangkan Bulgaria dan Rumania akan menjadi anggota pada tahun 2007.

Perluasan ini akan menghilangkan pembagian Eropa yang masih bercokol setelah Perang Dingin usai, dan diharapkan akan meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi Eropa. Ke-10 negara anggota baru ini ditarik ke dalam proses negosiasi Uni Eropa yang sangat kompleks, yakni kepentingan-kepentingan yang berseberangan antarnegara diselesaikan secara sangat detail melalui berbagai pedoman legal dan prosedural, dan melalui kerja sama multilateral yang intensif pada berbagai tingkat administrasi.

Karena itu, perselisihan tidak boleh meningkat menjadi persengketaan karena terlalu banyak kepentingan bersama akan terkorbankan. Dengan keanggotaan negara-negara baru ini diharapkan pula bahwa tidak satu pun dari mereka akan kembali ke sistem pemerintahan otoriter.

Saling ketergantungan ekonomi dan proses penyesuaian yang harus dilalui negara-negara Eropa Tengah ini diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tambahan, tidak saja bagi negara-negara Eropa Tengah, tetapi juga untuk ke-15 negara anggota yang lama (UE15). Di tahun 2001, misalnya, ekspor Jerman ke Eropa Tengah mencapai lebih dari 11 persen dari ekspor negara itu, lebih kurang sama dengan seluruh ekspor Jerman ke Amerika Serikat.

Menurut Komisi Eropa, perluasan ke wilayah Timur berarti bahwa pertumbuhan ekonomi UE15 akan meningkat dengan 0,5 sampai 0,7% pertahunnya. Negara-negara yang paling banyak memperoleh keuntungan dari perluasan ini ialah Jerman dan Austria, di mana pertumbuhan setahunnya akan mencapai 1%. Untuk Jerman angka ini ialah 19,82 miliar euro.

Akhir tahun 2002, ekspor UE15 mencapai 994 miliar euro yang mencakup 20,5 persen dari ekspor dunia. Sebaliknya, impor UE15 mencapai 988 miliar euro atau 18,6 persen dari impor dunia. Tidak ada "letusan besar" (big bang) untuk

---

<sup>65</sup> Kompas Perluasan Keanggotaan Uni Eropa 2004 C.P.F Luhulima diakses melalui [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

menyambut perdagangan pada 1 Mei 2004 karena dalam rangka perdagangan perluasan sebenarnya sudah terjadi. Lebih dari 95 persen dari perdagangan UE dengan pendatang baru sudah di-"liberalisasi" sebelum perluasan itu, dan karena itu pola perdagangan sudah stabil.<sup>66</sup> Tingkat produk domestik kotor (GDP) anggota UE baru berkisar antara 35 persen dari rata-rata UE untuk Latvia sampai 74 persen untuk Slovenia.

Mitra dagang terbesar UE ialah Amerika Serikat, Swiss, China, Jepang, dan Rusia. Di tahun 2002, perdagangan UE25 (UE15 dan 10 calon negara anggota UE) dengan Amerika Serikat ialah sebesar 429.944 juta euro atau 23,30 persen. Dengan Swiss angka itu ialah 136.378 juta euro atau 7,40 persen; dengan China 119.154 juta euro atau 6,50 persen; dengan Jepang 119.055 juta euro atau 6,40 persen; dan dengan Rusia 97.126 juta euro atau 5,30 persen. Kelima mitra dagang UE ini kiranya akan bertahan dan mungkin bahkan meningkat sesudah perluasan 1 Mei 2004. Pertanyaan yang sangat penting dari segi ekonomi ialah bagaimana perluasan itu dibiayai dan apakah biaya itu tersedia? Di dalam anggaran belanja Uni Eropa tahun 2004-2006, biaya sebesar 40,85 miliar euro sudah dialokasikan untuk negara anggota baru ini.

Pembiayaan langsung subsidi bagi petani di negara-negara anggota baru sangat problematis. Kendati petani mereka akan menerima bantuan penuh UE sesudah masa transisi sepanjang sepuluh tahun, mereka ini akan menerima dana dari UE sebesar 10 miliar euro untuk periode 2004-2006, dan karena itu akan merupakan penerima pertama bantuan UE untuk penyesuaian perluasan ini.

Negara-negara lama dan baru harus mencapai suatu persetujuan mengenai pembiayaan UE di masa depan yang mencerminkan prioritas politik integrasi Eropa yang sesuai pula dengan prinsip solidaritas UE.

Perjanjian perdagangan yang dibuat untuk membuka jalan bagi perluasan ini telah meniadakan sebagian besar rintangan, seperti tarif dan kuota ekspor mereka ke UE, yang menjadi mitra dagang mereka yang terbesar.

---

<sup>66</sup> Ibid

Perdagangan dua arah telah membesar dan UE15 mencatat suatu surplus sebesar 18 miliar euro di tahun 2002. Para pendatang baru telah menarik keuntungan dari suatu gelombang investasi perusahaan-perusahaan UE15 di sektor-sektor otomotif, ritel, perbankan, energi, dan telekomunikasi.

Kebebasan berpindah penduduk, yang paling ditakuti Jerman dan Austria, baru akan ditetapkan sesudah suatu masa transisi dari dua sampai tujuh tahun. Pengawasan daerah perbatasan baru akan mulai ditiadakan sesudah masa transisi yang lebih lama, yang masih diperhitungkan. Jadi, suatu "gelombang migrasi pekerja" dari negara-negara Eropa Tengah diperkirakan tidak akan terjadi selama masa transisi ini. Yang akan berpindah ialah para pekerja dengan keterampilan tinggi dan para spesialis, dan para pekerja dari daerah-daerah perbatasan dengan status imigrasi terbatas yang mencoba keuntungannya di pasar tenaga kerja negara-negara Eropa Barat, yang memang tidak ditakuti.

Negara anggota UE15 sebelum tahun 2004 dapat, untuk periode maksimal tujuh tahun, menentukan bilamana tenaga kerja dari negara anggota baru memasuki pasar tenaga kerja mereka. Pengalaman dengan perluasan-perluasan sebelumnya telah menunjukkan bahwa hanya sedikit tenaga kerja yang beremigrasi.

Akan tetapi, pembatasan perpindahan penduduk tidak akan mengurangi kemampuan bersaing negara-negara anggota baru. Wilayah-wilayah perbatasan yang secara struktural lebih lemah harus memperhitungkan persaingan yang meningkat dari negara-negara baru ini. Para ekonom berpendapat bahwa neraca perdagangan UE dengan Republik Ceko dan Slowakia, Polandia dan Hongaria, berpengaruh langsung pada terciptanya lapangan kerja bagi 65.000 pekerja di industri manufaktur, dan angka ini dapat meningkat menjadi 114.000.

Sebelum anggota baru dapat memanfaatkan mata uang euro, mereka harus dapat memenuhi persyaratan-persyaratan Uni Ekonomi dan Moneter (UEM) tentang defisit, utang, inflasi, dan stabilitas nilai tukar. Hal ini berarti bahwa mereka tidak dapat memanfaatkan euro sebelum tahun 2006 kendatipun berbagai anggota baru sudah menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk menggunakan

euro secepatnya. Ada berbagai faktor yang menguntungkan dan merugikan yang harus dipertimbangkan negara anggota baru sebelum mereka menggunakan euro dan strategi penggunaannya dapat berbeda karena tergantung dari persepsi kepentingan nasional.

Pada satu pihak, penggunaan Euro sebaik mungkin dapat menjamin stabilitas moneter, menarik investasi, dan mungkin pula membawa tingkat bunga yang lebih rendah bagi bisnis dan konsumen. Permasalahan yang besar lain ialah pola pengambilan keputusan. Dengan 25 delegasi menteri yang menghadiri setiap pertemuan dari Dewan Uni Eropa masalah pengelolaannya sangat besar. Lagi pula, kesulitan mengenai bahasa akan bertambah karena sembilan bahasa akan ditambah pada 11 yang sudah ada, yang menjadi bahasa resmi UE.

Tapi tampaknya biaya tambahan bagi penerjemahan dianggap marginal. Menurut Komisi Eropa, biaya multilingualisme UE itu sama dengan harga secangkir kopi per warga UE setahun.<sup>67</sup> Semua negara anggota baru, kecuali Polandia, adalah negara-negara kecil. Integrasi ekonomi dan moneter ini belum dapat dilaksanakan di bidang politik luar negeri dan keamanan Uni Eropa serta di bidang kehakiman dan dalam negeri. Di kedua bidang kerja sama Traktat Maastricht ini, tingkat integrasi belum setinggi tingkat integrasi ekonomi dan keuangan. Di kedua bidang ini bentuk kerja sama masih bersifat multilateral kendatipun sifat kedaulatan dan non-intervensi tidak begitu ketat lagi seperti semula, sesuai dengan ketentuan Traktat Westfalia dari tahun 1648, karena pengaruh yang sangat kuat dari globalisasi dan perkembangan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Demokrasi dan hak asasi serta keamanan dan pembangunan manusia merupakan landasan utama pengembangan kerja sama dan integrasi politik, baik dalam maupun luar negeri.

Perkembangan di bidang perdagangan tidak akan mengubah pola ekspor dan impor UE25, seperti kita lihat di dalam statistik di atas. Bahkan, untuk negara

---

<sup>67</sup> Ibid

berkembang, ke-10 negara Eropa Tengah itu akan menjadi pesaing berat dalam komoditas yang dihasilkan mereka pula karena bantuan untuk meningkatkan mutu produksi sesuai dengan selera konsumen di EU15 terjamin dan biaya transportasi yang jauh lebih rendah. Pasca Perang Dingin, muncul negara-negara baru di kawasan Eropa Tengah dan Timur akibat runtuhnya Uni Soviet. Beberapa negara baru tersebut menyatakan keinginannya untuk melepaskan diri dari komunis dan bergabung dengan Uni Eropa. Fenomena ini mendorong Uni Eropa untuk mempertimbangkan perluasan jumlah keanggotaannya demi menciptakan suatu integrasi yang lebih luas di kawasan Eropa.

Tabel 2.1. Statistik Negara-Negara Kandidat Uni Eropa Tahun 1998

Negara	Populasi (Juta jiwa)	Pendapatan Per kapita (US \$)	Persentase ekspor ke Uni Eropa
Bulgaria	8.6	4.47	40.8
Estonia	1.6	3.2	n.a
Hongaria	10.3	6.26	49.5
Latvia	2.7	5.4	n.a
Lithuania	3.7	5	n.a
Malta	0.4	8.28	74.4
Rep.Slowakia	5.4	6.45	49.5
Republik Ceko	10.3	7.77	49.5
Republik Polandia	38.7	3.7	68.3
Rumania	23.2	3.37	32.5
<b>Siprus</b>	<b>0.7</b>	<b>14.47</b>	<b>40.8</b>
Slovenia	2	8.1	n.a
<b>Turki</b>	<b>57.7</b>	<b>5.55</b>	<b>51.7</b>

Sumber: *Mission o the Republic of Indonesia to the European Communities*, 2000:1)

### 2.1.2 Mekanisme Penerimaan Keanggotaan Uni Eropa

Pasal 18 *Single European Act* menyatakan bahwa negara Eropa manapun yang demokratis, yang ingin dan bersedia bekerja sama dalam proses unifikasi Eropa dapat mengajukan permohonan untuk menjadi anggota. Sedangkan pasal 237 Perjanjian Roma menyebutkan "*Any European Country may apply to become a member of the Community* ".<sup>68</sup>

<sup>68</sup>(<http://europa.eu.int>).25 Mei 2005 Pukul 09.08 Wib

Keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi setiap negara Eropa yang ingin menjadi anggota dengan dua persyaratan. Pertama, negara yang bersangkutan harus berada di benua Eropa. Kedua, negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, penghormatan Hak Asasi Manusia dan menjalankan semua peraturan perundangan Um Eropa (*acquis communautaires*).

Penerimaan anggota baru Uni Eropa telah diatur dalam pasal 49 *Treaty of European Union*, bahwa Dewan Uni Eropa harus bulat setuju untuk membuka negosiasi, setelah berkonsultasi dengan Komisi Eropa dan menerima persetujuan resmi dari Parlemen. Kondisi penerimaan, periode transisi, dan penyesuaian terhadap semua Treaty yang mendasari pembentukan Uni Eropa harus menjadi subyek perjanjian antara negara pemohon dengan negara anggota.<sup>69</sup>

Negara pemohon dan Uni Eropa menandatangani *the European Agreement* yang menjadi dasar hukum bagi kerjasama antara kedua belah pihak untuk meningkatkan perdagangan bebas antara negara pemohon dengan Uni Eropa, berdasarkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Perjanjian tersebut meliputi hubungan perdagangan bebas, dialog politik dalam bidang hukum; kebebasan dalam pergerakan modal, barang serta individu ; dan bidang-bidang kerjasama lainnya seperti industri, lingkungan hidup, transportasi serta bea cukai.

Kemudian Uni Eropa membuat suatu *pre-accession strategy* untuk mempersiapkan negara-negara yang telah menandatangani *European Agreement* tadi. Dalam *The European Agreement*, terdapat badan-badan yang bertanggung jawab dengan proses penerimaan negara-negara kandidat, yaitu:

- *Association Council*, merupakan agenda pertemuan bilateral tingkat meteri antara Uni Eropa dan negara kandidat, membahas berbagai bidang yang diperkirakan cukup penting untuk didiskusikan antara kedua pihak;
- *Association Committees*, merupakan pertemuan para pejabat senior untuk mengkaji lebih mendalam keseluruhan bidang yang, termuat dalam *The European Agreement*. Badan ini dibantu oleh sejumlah sub komite Uni

---

<sup>69</sup> (<http://europa.eu.int>).26 Mei 2005 Pukul 12.07 Wib

Eropa yang mengkaji secara teknis bidang-bidang yang termasuk dalam perjanjian;

- *Joint Parliamentary Committees*, adalah suatu badan yang mengupayakan kerjasama antara parlemen nasional negara kandidat dengan anggota parlemen Uni Eropa.

Pada bulan Juni 1993, *Copenhagen European Council* mengakui hak negara-negara Eropa Tengah dan Timur untuk bergabung dengan Uni Eropa apabila mereka memenuhi tiga kriteria, yakni:

- Adanya institusi yang stabil, yang dapat menjamin berjalannya demokrasi, penegakan hukum, hak asasi manusia dan perlindungan terhadap minoritas;
- Adanya ekonomi pasar dengan kapasitas yang memungkinkan dalam menghadapi tekanan kompetitif dan tekanan pasar Uni Eropa;
- Kemampuan memenuhi kewajiban keanggotaan termasuk taat pada cita-cita politik, ekonomi dan moneter Uni Eropa.<sup>70</sup>

Kriteria-kriteria ini lebih dipertegas lagi dalam *Madrid European Council* pada bulan Desember 1995. *Madrid European Council* juga menekankan pentingnya mengadaptasi struktur-struktur administratif negara-negara pemohon untuk menciptakan kondisi bagi suatu integrasi yang harmonis.

Permintaan resmi dari suatu negara untuk menjadi anggota disampaikan kepada Dewan Menteri.

Dewan Menteri sebagai badan pengambil keputusan pada tingkat Uni Eropa meneruskan tersebut terlebih dahulu kepada Komisi. Tugas Komisi dalam hal ini menyusun suatu pendapat (*opinion*) tentang calon anggota.

Akta Tunggal Eropa menambahkan bahwa penerimaan anggota baru dan persetujuan asosiasi antara Uni Eropa dengan suatu negara harus terlebih dahulu mendapat izin Parlemen Eropa.<sup>71</sup>

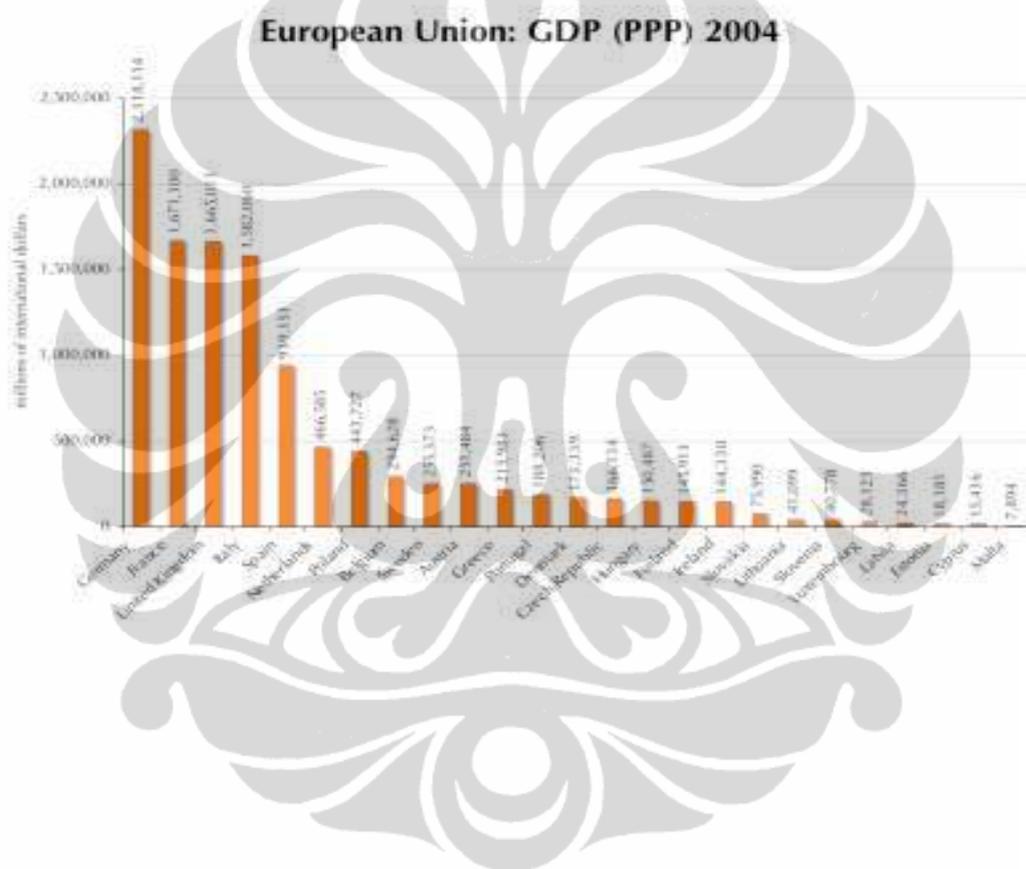
---

<sup>70</sup> Agenda 2000: *For A Stronger and Wider Union*, 1997 Hlm 6

<sup>71</sup> <http://europa.eu.int>. 26 Mei 2005. Pukul 00.06 Wib

Apabila negara pemohon dianggap telah dan mampu memenuhi criteria atas, maka proses ini akan berlanjut dengan dibukanya negosiasi penerimaan. Sebelum negosiasi dibuka, dilakukan suatu evaluasi terhadap undang-undang negara tersebut untuk mempersiapkan suatu program kerja dan menentukan posisi negosiasi.

Setelah itu, negosiasi dimulai dalam bentuk *Intergovernmental Conference bilateral* (Uni Eropa dan negara pemohon), mempertemukan para menteri setiap enam bulan dan duta besar setiap bulan. Reformasi ekonomi-politik yang dilakukan negara pemohon dimonitor serta dipelajari secara berkala dan laju negosiasi ditentukan oleh hasil penilaian tersebut.<sup>72</sup>

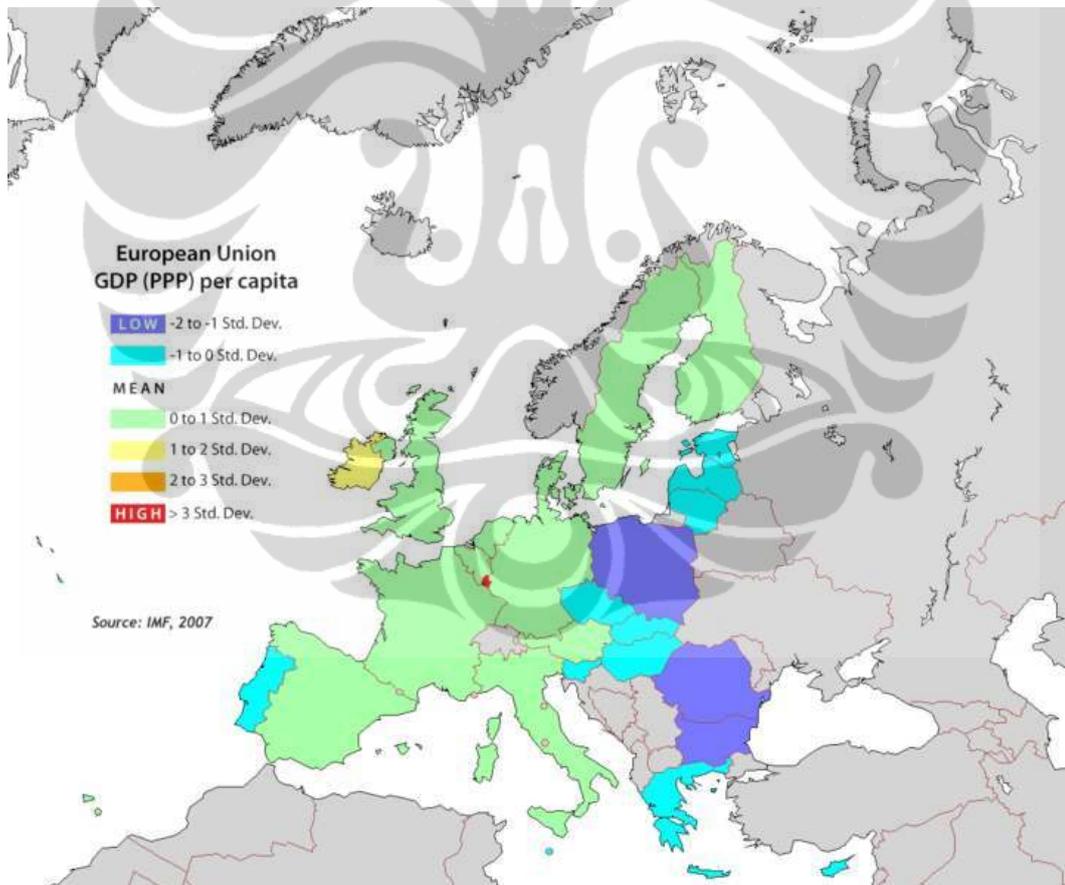
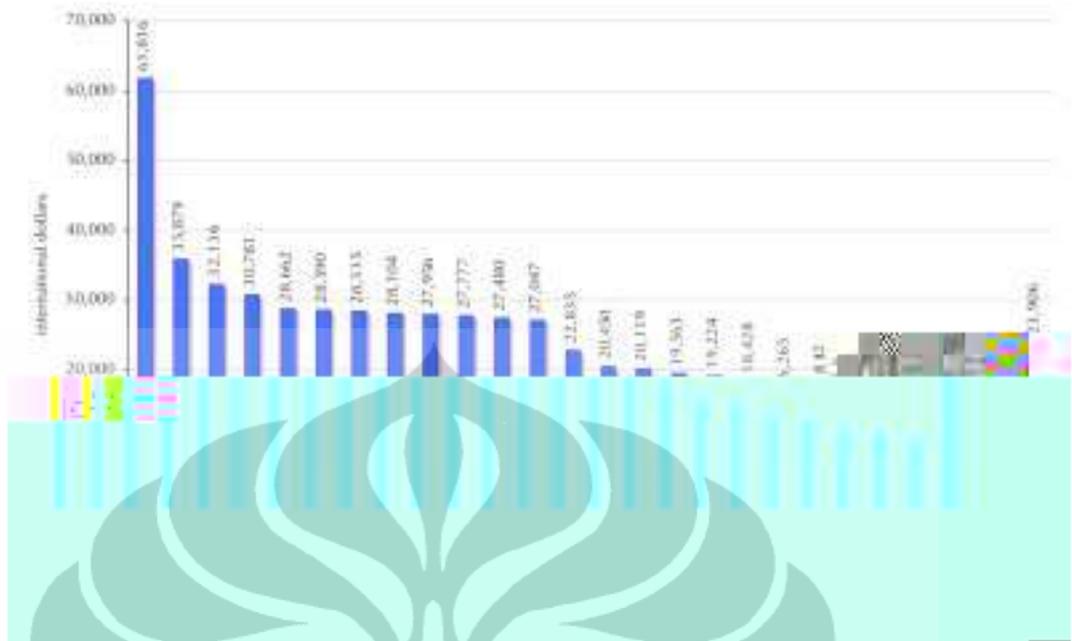


<sup>72</sup> (<http://europa.eu.int>).26 Mei 2005 . Pukul 00.09 Wib

**GDP (PPP) per kapita, 2004**

<b>Negara anggota</b>	<b>PDB (PPP) <i>juta dolar int.</i></b>	<b>PDB (PPP) per kapita <i>dolar int.</i></b>	<b>PDB (nominal) per kapita <i>dolar int.</i></b>
<b>Uni Eropa</b>	<b>12.329.110</b>	<b>26.900</b>	<b>29.203</b>
 <a href="#">Luksemburg</a>	30.674	66.821	73.147
 <a href="#">Republik Irlandia</a>	164.190	40.003	48.753
 <a href="#">Denmark</a>	187.721	34.718	46.691
 <a href="#">Austria</a>	267.053	32.802	37.688
 <a href="#">Belgia</a>	324.299	31.159	35.068
 <a href="#">Finlandia</a>	161.099	30.818	36.522
 <a href="#">Belanda</a>	498.703	30.574	38.180
 <a href="#">Britania Raya</a>	1.825.837	30.227	36.429
 <a href="#">Jerman</a>	2.498.471	30.150	33.785
 <a href="#">Swedia</a>	267.427	29.537	39.101
 <a href="#">Italia</a>	1.694.706	29.218	29.635
 <a href="#">Perancis</a>	1.811.561	29.019	33.855
 <a href="#">Spanyol</a>	1.026.340	24.803	27.175
 <a href="#">Slovenia</a>	43.260	21.695	18.527
 <a href="#">Yunani</a>	236.311	21.529	20.006
 <a href="#">Siprus</a>	16.745	20.669	20.866
 <a href="#">Malta</a>	7.909	20.015	13.742
 <a href="#">Ceko</a>	198.976	19.488	11.929
 <a href="#">Portugal</a>	203.947	19.388	16.525
 <a href="#">Hongaria</a>	162.289	16.627	11.059
 <a href="#">Estonia</a>	22.239	16.461	9.424
 <a href="#">Slowakia</a>	87.129	16.110	8.549
 <a href="#">Lituania</a>	49.106	14.338	7.268
 <a href="#">Polandia</a>	512.890	13.440	7.487
 <a href="#">Latvia</a>	30.227	13.059	6.793
 <a href="#">Bulgaria</a>	71,381	9,205	3.328
 <a href="#">Rumania</a>	183,162	8,258	3.603
<b>Negara Kandidat</b>	<b>GDP (PPP) <i>juta dolar int.</i></b>	<b>GDP (PPP) per kapita <i>dolar int.</i></b>	<b>GDP (nominal) per kapita <i>dolar int.</i></b>
 <a href="#">Kroasia</a>	55.638	12.364	8.416
 <a href="#">Turki</a>	570.748	7.958	4.925

## European Union: GDP (PPP) per capita 2004



Bagi setiap, negara pemohon dibentuk suatu *Accession Partnership* yang akan mengkoordinasikan bantuan yang disediakan oleh Uni Eropa dan membuat prioritas untuk setiap sektor dalam penerapan peraturan *Community*.

Kesetiaan pemohon terhadap pemenuhan dan pelaksanaan prioritas-prioritas ini menentukan bantuan finansial *Community*. Setiap negara tersebut kemudian membuat suatu program detail pengadaptasian *Community Aqis* guna mengatur penerapan priortas-prioritas ini.

Negara-negara tersebut berkomitmen sesuai jadwal yang ditentukan, mempersiapkan sumber daya manusia dan finansial yang diperlukan untuk mencapainya. Program ini disesuaikan sambil berjalan oleh Komisi dan negara yang bersangkutan. Prioritas-prioritas ekonomi juga dibuat. Ada tiga instrumen finansial dalam *Accession Partnership* yang akan membantu mendukung reformasi di negara-negara pemohon yaitu dana bantuan pertanian, dana bantuan struktural dan program Phare.

